

KEABSAHAN SURAT PESANAN SEBAGAI KONTRAK DALAM PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA KONDISI DARURAT COVID-19

Siti Fatimah Az Zahra* dan Antari Innaka Turingsih**

INTISARI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji keabsahan hukum surat pesanan sebagai kontrak dalam pengadaan APD pada kondisi darurat Covid-19 dan mengevaluasi mekanisme pengakhiran kontrak tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan hukum di Indonesia, khususnya Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya kontrak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Cara memperoleh data primer dari studi kepustakaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui wawancara dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis dan metode kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, surat pesanan dapat dianggap sah sebagai kontrak jika memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19, surat pesanan menjadi solusi praktis sebagai kontrak untuk mempercepat pengadaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Kedua, proses pengadaan ini tetap memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Pengakhiran kontrak dapat terjadi melalui pemenuhan prestasi dan kesepakatan para pihak, Penelitian ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pengadaan darurat yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kata kunci:

keabsahan surat pesanan, kontrak, pengadaan APD, COVID-19

*. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: sitifatimahazzahra@mail.ugm.ac.id

** Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: antari_innaka@ugm.ac.id

THE VALIDITY OF PURCHASE ORDERS AS CONTRACTS IN THE PROCUREMENT OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) DURING THE COVID-19 EMERGENCY

Siti Fatimah Az Zahra* and RA Antari Innaka Turingsih**

ABSTRACT

This research aims to understand and examine the legal validity of purchase orders as contracts in the procurement of Personal Protective Equipment (PPE) during the COVID-19 emergency and evaluate the contract terminating mechanism based on Indonesian law, particularly Article 1320 of the Indonesian Civil Code, outlining contract validity requirements.

This research employs a juridical-normative approach. Primary data is obtained through literature reviews, while secondary data from interviews conducted with the National Public Procurement Agency (LKPP). The problem-solving approach used includes statutory and conceptual approaches. Data analysis is conducted qualitatively, presented descriptively and analytically, and conclusions are drawn deductively.

This research concludes that, firstly, a purchase order may be deemed valid as a contract if it satisfies the requirements outlined in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely agreement, capacity, specific object, and lawful cause. During emergency conditions such as the COVID-19 pandemic, purchase orders serve as a practical solution in lieu of contracts to expedite procurement, as stipulated in LKPP Regulation No. 13 of 2018 and LKPP Circular Letter No. 3 of 2020. Secondly, this procurement process requires strict oversight to prevent abuse. Contract termination may occur through the fulfillment of performance and mutual agreement of the parties. This research emphasizes the importance of flexibility and accountability in emergency procurement while maintaining compliance to applicable law.

Keywords:

validity of purchase order, contract, PPE procurement, COVID-19

*. Master's Student in Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta (Jakarta Campus). Email: sitifatimahazzahra@mail.ugm.ac.id

** Lecturer, Master's Program in Law (Jakarta Campus), Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta. Email: antari_innaka@ugm.ac.id